

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

Soal TIM, Jakpro Jangan “Melulu” Bisnis

JAKARTA - Wewenang PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam mengelola Taman Ismail Marzuki (TIM) harus diatur oleh Pemprov DKI Jakarta. Permintaan ini disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliyanasari. “DKI mengkaji kembali kewenangan Jakpro mengelola TIM agar tidak ‘melulu’ berorientasi bisnis,” katanya.

Penegasan itu disampaikannya terkait pembatalan gelaran tahunan Bulan Film Nasional (BFN) 2023 oleh Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Acara mestinya digelar 25 Maret-2 April. Pembatalan terganjal izin pemakaian ruang putar Kineforum TIM.

“Aspek seni dan keberlangsungan program mesti diperhatikan. Bagaimanapun TIM dibangun 100 persen dengan APBD DKI. Demikian juga, program-program yang diselenggarakan DKJ. Jadi, dalam pemanfaatannya harus mengutamakan kebutuhan masyarakat,” tandas Eneng.

Dia mengatakan Jakpro juga bagian dari Pemprov Jakarta. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak bisa kerja sama menyelenggarakan acara untuk menjaga ekosistem seni tetap eksis di Jakarta, khususnya film. Jangan sampai masalah ini berlarut dan dikhawatirkan memengaruhi ekosistem seni secara luas jika tidak segera dibenahi.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini minta Pemprov DKI harus memfasilitasi DKJ, untuk tetap melakukan gelaran kegiatan-kegiatan setiap tahun, juga membuka ruang diskusi DKJ bersama Jakpro agar tercipta kesepakatan bersama dalam pengelolaan TIM usai direvitalisasi.

“TIM sejak dulu dibangun dengan orientasi mengembangkan kesenian dan kebudayaan. Tidak ideal jika Jakpro mengedepankan sisi bisnis,” katanya. ■ Ant/G-1